

**TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN DAN PENCATATAN ASET DI DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**

**Anggi Fatikaningrum<sup>1</sup> , Rachmawati Novaria<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[anggingrum44@gmail.com](mailto:anggingrum44@gmail.com) , [nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melakukan rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pemanfaatan tanah aset desa secara digital dan terintegrasi. Permasalahan yang dihadapi antara lain validasi data APBDes yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pembaruan data aset desa. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode pendampingan teknis, observasi lapangan, dan verifikasi data administrasi desa. Data dikumpulkan melalui pengumpulan laporan APBDes, validasi aset tanah desa, dan pelatihan sistem informasi aset desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset berbasis digital, tersusunnya data APBDes yang lebih akurat, serta teridentifikasinya pemanfaatan tanah aset desa sesuai ketentuan. kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih efisien dan akuntabel.

**Kata kunci:** Tata kelola pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan, Aset desa, Digital governance

**ABSTRACT**

*Transparent management of village finances and assets is one of the key indicators in realizing good governance at the village level. This activity aims to improve the capacity of village officials in recapitulating Village Budget (APBDes) data and utilizing village land assets in a digital and integrated manner. The main problems encountered include suboptimal validation of APBDes data, limited human resources, and the lack of regular updates on village asset data. The activity was carried out at the Department of Community and Village Empowerment of Sidoarjo Regency using technical assistance, field observation, and administrative data verification methods. Data were collected through APBDes report compilation, validation of village land asset data, and training in the use of the village asset information system. The results show an increased understanding among village officials in managing digital-based financial and asset data, the preparation of more accurate APBDes data, and the identification of village land asset utilization in accordance with regulations. This activity contributes to improving the efficiency and accountability of village administration.*

**Keywords :** Village governance, Financial management, Village assets, Digital governance

## PENDAHULUAN

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan fisik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aset desa mencakup tanah, bangunan, peralatan, serta kekayaan lain yang dimiliki atau dikuasai desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Apabila pencatatan aset tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian data, menghambat proses perencanaan pembangunan, dan berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan aset. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar seluruh proses pengelolaan aset desa berjalan efektif.

Landasan hukum mengenai pengelolaan aset desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa aset desa wajib dikelola melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pelaporan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, desa harus memiliki kapasitas administrasi yang cukup serta memahami prosedur kerja yang telah ditetapkan pemerintah. Ketertiban administrasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan desa dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang aktif mengembangkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pemanfaatan tanah aset desa untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa rekapitulasi data APBDes dan pemanfaatan tanah aset desa di DPMD Sidoarjo belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh sistem administrasi yang masih bersifat manual, belum terintegrasi antar desa, serta rendahnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital (Laisa et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi dan pembaruan data berlangsung lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan.

Sebelum adanya optimalisasi, proses rekapitulasi dan pelaporan APBDes dilakukan secara manual, tidak seragam, serta memerlukan waktu lama untuk diverifikasi di tingkat kabupaten. Selain itu, data pemanfaatan tanah aset desa belum tersusun secara sistematis dan masih terdapat potensi tumpang tindih penggunaan lahan. Setelah dilakukan optimalisasi melalui sistem digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan tercipta sistem administrasi yang terintegrasi, cepat, dan akurat. Penerapan sistem digital seperti SITAS dan SIPADES memungkinkan pengelolaan data APBDes dan aset desa dilakukan secara real-time, transparan, serta mudah diakses oleh pemerintah maupun masyarakat (Dispmmd, 2024).

Dengan melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan efektivitas rekapitulasi data APBDes dan pemanfaatan tanah aset desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset berbasis digital, serta penguatan sistem administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melakukan rekapitulasi data APBDes dan pengelolaan tanah aset desa secara digital dan terintegrasi, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo selama 40 hari kerja, mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025, merupakan kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan teori dan konsep administrasi publik yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di lingkungan pemerintahan. Kegiatan magang ini tidak hanya menjadi sarana untuk memahami mekanisme administrasi di sektor publik, tetapi juga untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan pengalaman lapangan yang relevan dengan peminatan penulis dalam bidang administrasi pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaannya, praktikan menggunakan metode kualitatif partisipatoris, yaitu metode yang menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam seluruh proses kegiatan di instansi tempat magang. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga turut berperan langsung dalam aktivitas administrasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Metode kualitatif partisipatoris dimulai dengan tahap perencanaan, di mana praktikan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk memahami struktur organisasi, pembagian tugas, serta tujuan kegiatan yang akan dilakukan selama magang. Tahap ini penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan mahasiswa dapat berkontribusi secara optimal dalam setiap kegiatan yang dijalankan.

Selanjutnya, pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui berbagai teknik seperti observasi langsung, wawancara informal dengan pegawai bidang, serta analisis dokumen administrasi. Praktikan terlibat secara aktif dalam proses rekapitulasi data administrasi pemerintahan desa, validasi dan penginputan data APBDes, rekap tanah kas desa dan aset desa, serta pembuatan laporan penyaluran dana desa. Melalui keterlibatan ini, praktikan dapat memahami dinamika administrasi pemerintahan, alur koordinasi antarbidang, serta sistem pencatatan aset desa yang diterapkan di lingkungan DPMD Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, praktikan juga mengikuti rapat koordinasi aset tanah di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memahami proses komunikasi dan pengambilan keputusan antarinstansi dalam penyelesaian masalah aset desa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi dalam tata kelola aset desa. Selama masa magang, praktikan ditempatkan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas pokok dalam pembinaan dan pengawasan administrasi desa, termasuk pengelolaan aset dan pelaporan keuangan desa. Kegiatan magang di bidang ini memberikan pengalaman langsung dalam mengelola data aset desa menggunakan perangkat digital seperti Microsoft Excel dan sistem informasi internal DPMD.

Melalui penerapan metode kualitatif partisipatoris ini, praktikan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja pemerintahan, memahami praktik administrasi publik secara nyata, serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pencatatan dan pengelolaan aset desa di Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL dan PEMBAHASAN

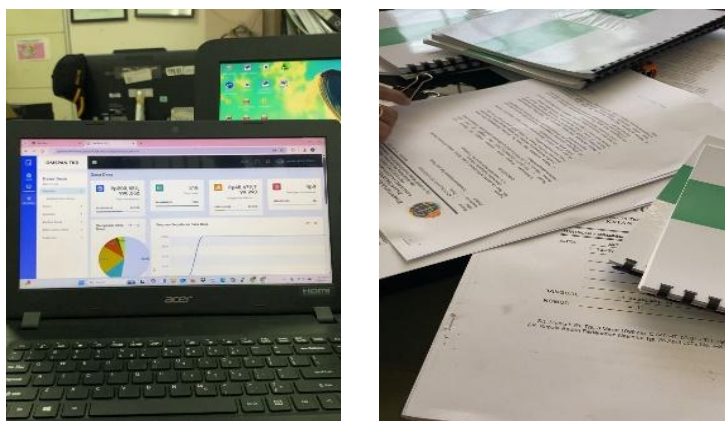
Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memberikan berbagai pengalaman berharga bagi mahasiswa. Salah satu keunggulan utama selama pelaksanaan magang adalah adanya fleksibilitas dan kepercayaan yang diberikan instansi kepada mahasiswa dalam menjalankan tugas. Fleksibilitas ini memungkinkan mahasiswa menyesuaikan metode dan waktu kerja dengan kegiatan yang sedang berjalan di bidang penempatan, sehingga menciptakan suasana kerja yang produktif dan kondusif.

mahasiswa mendapatkan kepercayaan penuh untuk melakukan rekapitulasi dan input data aset desa secara mandiri, termasuk data APBDes, penyaluran dana desa, serta pemanfaatan tanah kas desa. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan pihak DPMD terhadap kemampuan dan integritas mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam mengelola data yang bersifat penting dan sensitif. Proses input dan validasi data ini memberikan pengalaman nyata dalam administrasi publik serta melatih ketelitian dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga akurasi informasi.

Pembimbing dari pihak DPMD juga memberikan bimbingan sekaligus keleluasaan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi tinggi untuk bekerja secara profesional sesuai dengan standar instansi pemerintahan. Selain itu, fasilitas yang disediakan, seperti komputer, akses data aset desa, dan perangkat administrasi digital, turut mendukung kelancaran kegiatan magang, memungkinkan mahasiswa bekerja dengan alat yang relevan dan efisien. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengelolaan data aset desa, tetapi juga mengembangkan sikap disiplin, kejujuran, dan profesionalisme yang penting dalam dunia kerja birokrasi.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah rekapitulasi data penyaluran dana desa dan administrasi pemerintahan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki laporan administrasi dan data penyaluran dana desa yang lengkap, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penulis terlibat dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penyusunan data dari berbagai desa yang meliputi laporan keuangan, profil desa, dokumen kegiatan pembangunan, serta data aset desa.

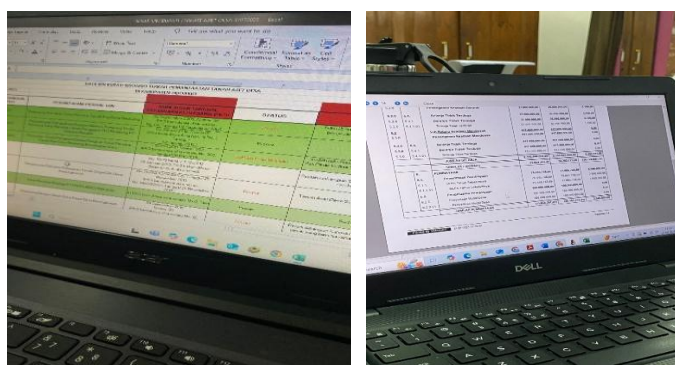
Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa keteraturan dan ketepatan dalam pelaporan data sangat penting untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penulis juga menyadari bahwa konsistensi dalam administrasi dan pelaporan keuangan desa menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan rekapitulasi data yang terarah dan terintegrasi, proses evaluasi, perencanaan, serta pengawasan penggunaan dana desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.



Gambar 1. Rekap Data Administrasi Pemerintah Desa dan Penyaluran Dana Desa

Selain kegiatan rekapitulasi administrasi, penulis juga terlibat dalam rekapitulasi data APBDes dan pemanfaatan tanah aset desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan tanah aset desa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Proses rekapitulasi mencakup pemeriksaan dan pembaruan data APBDes yang meliputi rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, serta pendataan penggunaan tanah aset desa berdasarkan status, lokasi, luas, dan pihak yang bekerja sama dalam pengelolaannya.

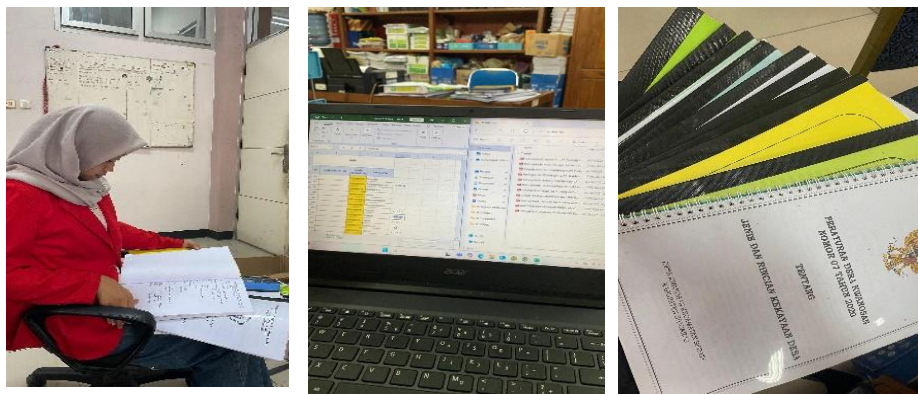
Kegiatan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban administrasi dan transparansi pengelolaan aset desa agar tidak terjadi kesalahan pencatatan, tumpang tindih pemanfaatan, maupun penyalahgunaan aset. Melalui pengalaman tersebut, penulis memahami bahwa rekapitulasi data APBDes dan pemanfaatan tanah aset desa memerlukan ketelitian, tanggung jawab, serta koordinasi lintas bidang yang baik antara pihak desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, penulis juga belajar bahwa pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting dalam mendukung evaluasi dan perencanaan pembangunan desa yang transparan, tertib, dan akuntabel.



Gambar 2. Rekapitulasi Data APBDes dan Pemanfaatan Tanah Aset Desa

Selain itu, penulis juga melaksanakan tugas rekapitulasi dan validasi data tanah kas desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh informasi terkait status, luas, lokasi, dan pemanfaatan tanah kas desa tercatat secara benar dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan proses penginputan dan pembaruan data ke dalam format rekapitulasi menggunakan lembar kerja Excel atau database yang telah ditentukan, agar data tersusun secara sistematis dan mudah diakses.

Proses rekapitulasi ini mencakup tahapan pengumpulan, pemeriksaan, verifikasi, serta penghitungan total luas tanah kas desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh kegiatan dilaksanakan di bawah bimbingan mentor bidang guna memastikan hasil yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan serta bahan evaluasi oleh Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Rekapitulasi Tanah Aset Desa

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama magang, penulis memperoleh pemahaman bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang tertib dan akuntabel. Melalui pembinaan berkelanjutan, pendampingan administratif, dan proses verifikasi data yang sistematis, DPMD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pencatatan aset desa. Selama melaksanakan tugas, penulis menyadari bahwa ketertiban administrasi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparat desa, tetapi juga pada kesesuaian prosedur, ketepatan pembaruan data, dan penerapan sistem digital secara konsisten. Pengalaman magang ini juga memberikan manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam melatih kemampuan berpikir analitis, komunikasi, manajemen data, serta adaptasi terhadap lingkungan birokrasi.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama magang, penulis memperoleh pemahaman bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang tertib dan akuntabel. Melalui pembinaan berkelanjutan, pendampingan administratif, dan proses verifikasi data yang sistematis, DPMD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pencatatan aset desa. Selama melaksanakan tugas, penulis menyadari bahwa ketertiban administrasi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparat desa, tetapi juga pada kesesuaian prosedur, ketepatan pembaruan data, serta penerapan sistem digital secara konsisten. Pengalaman magang ini juga memberikan manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam melatih kemampuan analitis, komunikasi, manajemen data, serta adaptasi terhadap lingkungan birokrasi.

Selain memberikan pemahaman praktis, kegiatan magang ini memperkuat kesadaran penulis mengenai pentingnya integrasi sistem digital dan penerapan prinsip tata kelola modern dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Penulis memahami bahwa efektivitas pelayanan administrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan struktur organisasi, namun juga oleh komitmen aparatur dalam menjaga akurasi data dan mengikuti prosedur kerja. Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan, penulis memperoleh pembelajaran bahwa ketertiban pencatatan aset desa memiliki peran penting dalam menciptakan akuntabilitas pemerintahan desa serta mendukung kelancaran proses pembangunan. Pengalaman ini sekaligus memperdalam pemahaman penulis terhadap teori yang digunakan dalam laporan magang.

Digital Governance menurut Richard Heeks (2018) merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat pengolahan data, serta memperluas transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi dipandang tidak hanya sebagai perubahan media dari manual ke elektronik, tetapi sebagai transformasi sistem birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis data. Dalam konteks kegiatan magang, teori ini tercermin pada proses pencatatan aset desa, pengelolaan APBDes, serta verifikasi dokumen administrasi yang dilakukan melalui file digital. Penggunaan perangkat seperti Excel dan database internal DPMD membantu mempercepat pembaruan data, meminimalkan risiko kesalahan input, dan mempermudah proses pencarian informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Heeks bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas tata kelola apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kemampuan teknis aparatur desa.

Heeks juga menjelaskan konsep *design–reality gap*, yaitu kesenjangan antara sistem digital yang direncanakan dengan kondisi nyata di lapangan. Selama magang, penulis menemukan bahwa tidak semua desa mampu menyeragamkan format laporan atau memperbarui data sesuai ketentuan, sehingga proses verifikasi menjadi lebih lama. Temuan ini memperkuat pandangan Heeks bahwa keberhasilan digital governance sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia serta kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem digital secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori Digital Governance menjadi landasan penulis dalam menganalisis bagaimana proses administrasi desa di DPMD Sidoarjo berjalan, bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan ketertiban administrasi, serta hambatan apa saja yang muncul dalam implementasinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses administrasi desa memberikan pemahaman nyata tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengalaman langsung dalam mengelola dan memverifikasi data administrasi desa, mengelola aset, serta menyusun laporan keuangan desa menunjukkan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dan perencanaan pembangunan. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk sikap profesional, disiplin, dan kemampuan bekerja sama dalam lingkungan pemerintahan, sehingga menjadi bukti implementasi praktis teori tata kelola di tingkat pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan agar DPMD Kabupaten Sidoarjo terus mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan data desa, serta memperbarui dan mensinkronisasikan data secara berkala. Selain itu, program magang mahasiswa perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Upaya untuk membantu pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi juga perlu diperkuat untuk mendukung administrasi desa yang lebih baik yang berorientasi pada pelayanan publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dispmmd. (2024). *Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (Sipades) 3.0: Mendorong Tata Kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.  
[https://dispmmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/51\\_pemanfaatan-sistem-informasi-pengelolaan-aset-desasipades-30-mendorong-tata-kelola-desayang-transparan-dan-akuntabel](https://dispmmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/51_pemanfaatan-sistem-informasi-pengelolaan-aset-desasipades-30-mendorong-tata-kelola-desayang-transparan-dan-akuntabel)
- Inof, M., & Rantung, R. (n.d.). *DIGITAL GOVERNANSI*.
- Laisa, R. P., Rachman, E., & Hasan, K. K. (2025). Efektivitas Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Bolango. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 23956–23963.